

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional merupakan alat sekaligus tujuan yang sangat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Hal ini, terutama jika dikaitkan dengan peran dan fungsi pendidikan nasional dalam pelaksanaan pembangunan bangsa. Pendidikan nasional merupakan alat yang fungsional dalam upaya pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang berkualitas dan mampu mandiri serta dalam rangka pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh, yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila (USPN No.2 Tahun 1989). Dengan kata lain pendidikan nasional berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa.

Sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, maka manusia harus selalu meningkatkan derajat hidupnya

melalui pendidikan yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Mujadalah ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah akan mengangkat beberapa derajat diantara kamu orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan”(Departemen Agama Republik Indonesia, 1989 : 910)

Faktor pendidikan juga memiliki nilai kontribusi yang sangat tinggi bagi produktivitas nasional. Berbagai penelitian di sejumlah negara maju telah membuktikan bahwa peningkatan pendidikan berimplikasi positif dan signifikan terhadap peningkatan national income. Sebagai contoh, peningkatan pendidikan di Amerika Latin pada tahun 1964 telah mampu mengontrol peningkatan “national income” negara tersebut sebesar 5 % hingga 25 %. Contoh lain terjadi di Columbia, Honduras dan Venezuela pada periode 1957 - 1960. Sebagai implikasi nyata dari pengembangan dan peningkatan pendidikan, saat itu di Columbia terjadi peningkatan pendidikan nasional dari 7,3 % menjadi 11,7 %, di Honduras dari 9,4 % menjadi 15,6 %, dan di Venezuela terjadi peningkatan dari 4,4 % menjadi 9,2 % (Wahyuchomo,1993:2).

Peran pendidikan dalam peningkatan produktivitas nasional yang ditunjukkan oleh data-data di atas sangat diterima dan beralasan. Hal ini

terutama jika ditinjau dari keberadaan pendidikan yang pada hakekatnya merupakan pemasukan yang tidak langsung bagi proses produksi dan pemasukan langsung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan akan meningkatkan atau mempertinggi kualitas tenaga kerja, sehingga memungkinkan terjadinya angkatan kerja yang lebih terampil, haadal, dan sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional.

Selubungan dengan hal di atas, pembangunan pendidikan nasional, seperti ditegaskan dalam GBHN, harus diorientasikan pada proyeksi masa depan dan dititikberatkan pada upaya peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar bagi seluruh warga negara Indonesia.

Untuk merealisasikan sasaran pembangunan nasional tersebut, terutama dalam upaya perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh warga negara Indonesia, pemerintah pada awal PELITA VI (1994/1995) telah menandatangani Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Selubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan Wajib Belajar bukan hanya bagi anak usia 7 - 12 tahun untuk SD, akan tetapi juga termasuk anak usia 13 - 15 tahun untuk SLTP, karena Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berada dalam satu jenjang pendidikan. Dengan kata lain Wajib Belajar itu sendiri adalah pendidikan yang lamanya sembilan tahun, enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Apabila ditinjau dari segi satuan waktu, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun telah dilaksanakan kurang lebih 6 tahun, sejak tanggal 2 Mei 1994 sampai sekarang, namun keberhasilan Wajar Diknas 9 Tahun dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala yang ada di lapangan yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTP. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan Wajar Diknas 9 Tahun diantaranya adalah : (1) Keadaan geografis; (2) Daya tampung sekolah negeri terbatas; (3) Bekerja membantu orang tua mencari nafkah; (4) Penghargaan ijazah SD/MI dan SLTP, bahkan SLTA di perusahaan relatif disamakan; (5) kemampuan membiayai pendidikan masih terbatas; (6) Masuk SLTP tidak menjamin meningkatkan kesejahteraan hidup di masa depan.

Demikian halnya kenyataan yang penulis temukan di Desa Kudadepa Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya ternyata masih banyak anak-anak lulusan Sekolah Dasar yang tidak melanjutkan ke tingkat SLTP. Hal ini menunjukkan masih rendahnya motivasi masyarakat di pedesaan untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTP terutama pada desa-desa terpencil yang kurang mendapatkan informasi yang memadai mengenai pentingnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Fenomena tersebut di atas dapat menimbulkan permasalahan yang patut diteliti yaitu faktor-faktor apakah yang menyebabkan masih rendahnya motivasi masyarakat di pedesaan untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat

SLTP. Berdasarkan pengamatan sementara penulis, salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat motivasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTP adalah persepsi masyarakat terhadap Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, diantaranya masih adanya anggapan masyarakat bahwa "sekolah tidak sekolah sama saja". Selain itu masyarakat di pedesaan masih memiliki anggapan bahwa sekolah tidak memberikan nilai tambah bagi kepentingan pemenuhan dan peningkatan hidup keluarga.

Untuk menguji hipotesis tersebut maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pengaruhnya terhadap motivasi mereka untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTP.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MOTIVASI MEREKA UNTUK MENYEKOLAHKAN ANAKNYA KE TINGKAT SLTP (Penelitian di Desa ~~Kanalepa~~ Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya)".

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu persepsi masyarakat terhadap program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang disebut independen variabel (variabel bebas) dengan simbol X, dan motivasi

mereka untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTP yang disebut dependen variabel (variabel terkait) dengan simbol Y.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pengaruhnya terhadap motivasi mereka untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTP di Desa Kudadepa Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya.

Ber titik tolak dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka timbul beberapa implikasi permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Desa Kudadepa ?
2. Bagaimana motivasi masyarakat di Desa Kudadepa untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTP ?
3. Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat terhadap program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun terhadap motivasi mereka untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTP ?

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang memungkinkan timbulnya beberapa konotasi yang bisa mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman dari arti yang dimaksud dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis akan menjabarkan beberapa istilah sebagai berikut:

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan

pesan (Jalaludin Rakhmat, 1988: 51). Yang dimaksud persepsi masyarakat dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat terhadap Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang telah dicanangkan Pemerintah pada tanggal 2 Mei 1994, yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia.

Motivasi adalah suatu dorongan yang sudah menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama kebutuhan untuk mencapai tujuan, dengan kata lain dorongan yang mengacu pada faktor-faktor yang menggerakkan dan mengarahkan tingkah laku (Abd.Rahman Abror, 1993:114). Sedangkan yang dimaksud motivasi masyarakat di sini adalah suatu dorongan yang timbul dari masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTP sehingga dapat berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah terhadap Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia dalam tujuan Pendidikan Nasional.

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Desa Kudadepa.
2. Untuk mengetahui motivasi masyarakat di Desa Kudadepa untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTP.